



**KLIPING DIGITAL
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBIAYAAN
INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN**

12 - 13 Juli 2022



KLIPING BERITA DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

13 / 07 / 2022

Analisis Pemberitaan Media Online

NO	ANALISIS		TONE
1	TANGGAL MEDIA JUDUL NARASUMBER RESUME	<p>Selasa, 12 Juli 2022</p> <p>https://www.rumah.com/berita-properti/2022/7/205517/ribuan-pns-yogyakarta-butuh-pembiayaan-perumahan</p> <p>Ribuan PNS Yogyakarta Butuh Pembiayaan Perumahan</p> <p>Deputi Komisioner Bidang Hukum dan Administrasi BP Tapera Nostra Tarigan</p> <p>Kalangan pegawai negeri sipil (PNS) di Yogyakarta telah memutakhirkan datanya ke BP Tapera untuk mengetahui kebutuhan pembiayaan perumahan. Saat ini sebanyak 6.934 PNS telah memutakhirkan datanya dan menyatakan minatnya untuk pembiayaan perumahan baik KPR, KBR, maupun KRR. Bersama Pemerintah Daerah Istimewa Provinsi Yogyakarta, sebanyak 100 PNS Yogyakarta dan 1.000 PNS secara <i>online</i> mengikuti kegiatan sosialisasi program BP Tapera. Kegiatan ini terus berlanjut setelah sebelumnya dilakukan kegiatan yang sama di Pemprov Jawa Barat dan Jawa Timur hingga nanti ke-13 provinsi lainnya dalam waktu dekat.</p>	+
2.	TANGGAL MEDIA JUDUL NARASUMBER	<p>Selasa, 12 Juli 2022</p> <p>https://tirto.id/hingga-juli-2022-penyaluran-rumah-flpp-capai-99557-unit-gtYE</p> <p>Hingga Juli 2022, Penyaluran Rumah FLPP Capai 99.557 Unit</p> <p>Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Herry Trisaputra Zuna</p>	+



KLIPING BERITA DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

13 / 07 / 2022

Analisis Pemberitaan Media Online

	RESUME	Realisasi penyaluran program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga Juli 2022 mencapai 99.557 unit. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Herry Trisaputra Zuna merinci pada tahun 2022 perumahan KPR FLPP mencapai 200.000 Unit, Subsidi Selisih Bunga (SSB) sebanyak 769.903 Unit, Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) hingga 200.000 Unit. Kemudian Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) 22.582 Unit dan Tapera 109.000 Unit. Hingga akhir Juni 2022 realisasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mencapai 49,78% yaitu sebanyak 99.557 unit, SSB sebesar Rp111,08 miliar, SBUM mencapai 31,79% atau 63.587 unit dan BP2BT sebanyak 33,81% atau 2.463 unit.	
3	TANGGAL MEDIA JUDUL NARASUMBER RESUME	Selasa, 12 Juli 2022 https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/rasio-pendapatan-generasi-muda-tak-sebanding-dengan-harga-rumah/ Rasio Pendapatan Generasi Muda Tak Sebanding dengan Harga Rumah Muhammad Andri Perdana Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Andri Perdana Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) membenarkan pernyataan Sri Mulyani Menteri Keuangan yang menyatakan, generasi millenial akan kesulitan untuk memiliki rumah. Andri menilai, program pemerintah untuk KPR FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) cukup bagus. Tapi pencairan masih lamban karena rumah subsidi ini masih jauh dari fasilitas dan transportasi publik.	+
4	TANGGAL MEDIA JUDUL	Selasa, 12 Juli 2022 https://www.idxchannel.com/milenomic/intip-cara-mengajukan-kpr-untuk-pekerja-informal-tanpa-slip-gaji/all Intip Cara Mengajukan KPR untuk Pekerja Informal Tanpa Slip Gaji	+



KLIPING BERITA DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

13 / 07 / 2022

| Analisis Pemberitaan Media Online

NARASUMBER	Ari Kurniaman selaku Corporate Secretary BTN	
RESUME	Ari Kurniaman selaku Corporate Secretary BTN mengatakan, untuk KPR subsidi, debitur sektor informal dapat menggunakan fasilitas Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT). Sementara untuk KPR non subsidi, pekerja sektor informal dimungkinkan dan diklasifikasikan dalam segmen non fixed income. Untuk dapat diklasifikasikan sebagai segmen tersebut, terdapat sejumlah persyaratan yang perlu dipenuhi debitur. Diharapkan untuk kedepannya informasi digital dapat menjadi pengganti slip gaji bagi pekerja sektor informal yang akan menjadi debitur perseroan.	



12 / 07 / 2022

Sumber: rumah.com

Ribuan PNS Yogyakarta Butuh Pembiayaan Perumahan

Author: Wahyu Ardiyanto

RumahCom – Kalangan pegawai negeri sipil (PNS) di Yogyakarta telah memutakhirkan datanya ke BP Tapera untuk mengetahui kebutuhan pembiayaan perumahan. Saat ini sebanyak 6.934 PNS telah memutakhirkan datanya dan menyatakan minatnya untuk pembiayaan perumahan baik KPR, KBR, maupun KRR.

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) terus melakukan sosialisasi berbagai program pembiayaan perumahan dan pemutakhiran data pegawai negeri sipil (PNS) untuk memudahkan kalangan ini mendapatkan akses pembiayaan perumahan sesuai kebutuhannya.

Bersama Pemerintah Daerah Istimewa Provinsi Yogyakarta, sebanyak 100 PNS Yogyakarta dan 1.000 PNS secara *online* mengikuti kegiatan sosialisasi program BP Tapera. Kegiatan ini terus berlenjut setelah sebelumnya dilakukan kegiatan yang sama di Pemprov Jawa Barat dan Jawa Timur hingga nanti ke-13 provinsi lainnya dalam waktu dekat.

Menurut Deputi Komisioner Bidang Hukum dan Administrasi BP Tapera Nostra Tarigan, sebagaimana amanat UU No. 4 Tahun 2016 tentang Tapera, BP Tapera bertujuan menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang

berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan.

“Dengan tersedianya dana murah jangka panjang ini bisa dipenuhi kebutuhan hunian yang layak dan terjangkau bagi peserta melalui pengerahan, pemupukan, dan pemanfaatan dana Tapera. Untuk tahap awal ini pendanaan perumahan difokuskan untuk kalangan PNS terlebih dulu dan segera menyusul untuk seluruh pekerja di Indonesia,” ujarnya.

Untuk pengerahan dana Tapera ini meliputi pendaftaran peserta, pemberian nomor kepesertaan, pemutakhiran data peserta, dan pengetoran serta pengembalian simpanan Tapera. Pemupukan dana Tapera dilakukan untuk meningkatkan nilai dana simpanan peserta dengan prinsip konvensional maupun syariah sesuai pilihan peserta.

Selanjutnya melalui Kontrak Pengelolaan Dana Tapera (KPDT) BP Tapera dengan bank kustodian yang terdiri dari alokasi dana pemupukan (investasi), cadangan (pengembalian Simpanan), serta pemanfaatan (pembiayaan). Pada tahun 2020 lalu telah dilakukan pengalihan dana dan data Tabungan Perumahan (Taperum) PNS sebesar Rp11,8 triliun milik 5,04 juta PNS.

Sejak pengalihan tersebut hingga saat ini, BP Tapera telah membayarkan sejumlah Rp2,04 triliun kepada 495.000 peserta PNS



12 / 07 / 2022

| Sumber: rumah.com

pensiun. Untuk peserta di Pemprov Yogyakarta sendiri ada sebanyak 45.864 peserta PNS aktif yang terdiri dari 43.597 peserta memilih pengelolaan dana dengan prinsip konvensional dan 2.267 peserta memilih pengelolaan dana dengan prinsip syariah. Pemprov Yogyakarta telah menyelesaikan pemutakhiran data sebanyak 43.891 peserta (95,7 persen).

“Pemutakhiran data penting bagi Peserta untuk mengetahui dan memastikan informasi data peserta, status kepesertaan aktif atau non aktif, besaran setoran dan saldo simpanan, pilihan prinsip pengelolaan dana konvensional atau

syariah, serta rekening pengembalian simpanan pada saat pensiun,” jelas Nostra.

Hingga 6 Juli 2022, PNS di Pemprov Yogyakarta yang telah memutakhirkan datanya, ada peminat sebanyak 6.934 orang. Perinciannya, sebanyak 1.756 orang ingin mengakses KPR, 403 orang membutuhkan kredit bangun rumah (KBR), 3.998 orang membutuhkan kredit renovasi rumah (KRR).

<https://www.rumah.com/berita-properti/2022/7/205517/ribuan-pns-yogyakarta-butuh-pembiayaan-perumahan>



12 / 07 / 2022

Sumber: tirto.id

Hingga Juli 2022, Penyaluran Rumah FLPP Capai 99.557 Unit

Reporter & Penulis: Selfie Miftahul Jannah

Editor: Intan Umbari Prihatin

tirto.id - Realisasi penyaluran program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga Juli 2022 mencapai 99.557 unit. Itu merupakan bagian dari bantuan pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki rumah yang layak.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Herry Trisaputra Zuna merinci pada tahun 2022 perumahan KPR FLPP mencapai 200.000 Unit, Subsidi Selisih Bunga (SSB) sebanyak 769.903 Unit, Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) hingga 200.000 Unit. Kemudian Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) 22.582 Unit dan Tapera 109.000 Unit.

"Hingga akhir Juni 2022 realisasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mencapai 49,78% yaitu sebanyak 99.557 unit, SSB sebesar Rp111,08 miliar, SBUM mencapai 31,79% atau 63.587 unit dan BP2BT sebanyak 33,81% atau 2.463 unit," jelas dia dalam keterangan yang dikutip Selasa (12/7/2022)

Progres proyek Kerja sama pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) tahun 2022, terdiri dari 26 proyek yang masuk tahap penyiapan. Meliputi 13 proyek jalan dan jembatan, antara lain jalan pendukung IKN, OM Suramadu, Jalan Akses Exit Toll, Jalan Tol Cilacap-Yogyakarta, Jalan Tol Demak-

Tuban, dan Jalan Tol Ngawi-Bojonegoro-Babat, Jalan Tol Jember-Lumajang, Jalan Tol Jember-Situbondo, Jalan Tol Tulungagung-Kepanjen.

"Jembatan Pulau Laut-Tanah Bumbu, Jembatan Muna Buton, Jalan Tuban-Babat-Gresik, Jalan Tol Kohod-Lebakwangi," tambahnya.

Kemudian dari sektor Sumber Daya Air (SDA) terdapat enam proyek dalam penyiapan. Terdiri dari Bendungan Merangin di Jambi, PLTS Tiga Dihaji (Sumsel), Revitalisasi dan Modernisasi irigasi sistem interkoneksi HLD wilayah sungai (WS) Lombok, Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) dan PLTS Bendungan Rotiklot (NTT), PLTMH dan PLTS bendungan Napun Gete (NTT) serta DI Komering (Sumsel).

Sementara itu, dari sektor perumahan terdapat dua proyek rumah susun (rusun) yang ditawarkan lewat skema KPBU dalam tahap penyiapan. Terdiri dari Rusun Karawang Spuur dan Rusun IKN Tahap I.

Terakhir, untuk sektor permukiman, terdapat lima proyek yang sedang disiapkan, antara lain Pendampingan Penyiapan KPBU TPA Manggar (Balikpapan), Pendampingan Penyiapan KPBU SPAM Regional Jatigede (Jabar), SPAM Jatiluhur II (Ir. H.Juanda)-Jabar dan DKI Jakarta, Pendampingan Penyiapan KPBU SPAM Ayung terintegrasi dengan



**KLIPING BERITA DIREKTORAT JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN**

12 / 07 / 2022

| Sumber: tirto.id

SPAB Sidan (Bali) dan Pendampingan
Penyiapan KPBU SPAM dan SPAB Karian
Barat (Banten).

[https://tirto.id/hingga-juli-2022-
penyaluran-rumah-flpp-capai-99557-unit-
gtYE](https://tirto.id/hingga-juli-2022-penyaluran-rumah-flpp-capai-99557-unit-gtYE)



12 / 07 / 2022

Sumber: suarasurabaya.net

Rasio Pendapatan Generasi Muda Tak Sebanding dengan Harga Rumah

Author: Wildan Pratama

Muhammad Andri Perdana Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) membenarkan pernyataan Sri Mulyani Menteri Keuangan yang menyatakan, generasi millennial akan kesulitan untuk memiliki rumah.

Dia menjelaskan, kesulitan generasi millennial karena harus berkutat dengan bunga dari bank yang cukup tinggi. Karena menurut Andri, suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) cepat atau lambat akan segera naik.

“The Fed akan menaikkan suku bunga bulan ini, jika suku bunga naik maka ini akan memperlambat pemulihan ekonomi. Sedangkan di tahap yang sama akan ada kenaikan bunga KPR, sehingga kredit rumah makin tinggi,” kata Andri kepada **Radio Suara Surabaya**, Selasa (12/7/2022).

Oleh sebab itu, kata Andri jalan satu-satunya untuk bisa memiliki rumah adalah dengan segera melakukan pembelian rumah sebelum harga dan bunga bank dinaikkan. Karena sejauh ini, suku bunga di Indonesia masih bertahan di angka 3,5 persen sejak Februari 2021, kata Andri. Dan itu menjadi sejarah suku bunga paling rendah di Indonesia.

“Kemungkinan bertahannya suku bunga di angka itu tidak akan lama, jadi manfaatkan untuk segera beli rumah sekarang,” ujarnya.

Secara makro, kesulitan generasi saat ini dalam pembelian rumah menurut dia adalah perbedaan pendapatan dengan mahalnnya harga rumah. Dengan kondisi seperti ini milenial akan kesulitan membeli rumah, apalagi demandnya sangat tinggi.

“Jumlah babyboomers yang menghasilkan anak (milenial) lebih banyak, tentu pangsa pasar properti akan lebih tinggi, orang jadi berlomba-lomba pengen beli rumah, tapi tidak terbeli karena mahal,” katanya.

Andri menilai, program pemerintah untuk KPR FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) cukup bagus. Tapi pencairan masih lamban karena rumah subsidi ini masih jauh dari fasilitas dan transportasi publik.

Akibatnya, rumah subsidi yang berada di pinggiran kota tidak menjadi pilihan untuk dibeli karena tidak ditunjang sarana prasarana yang memadai.

“Mau beli di pusat kota sulit, harganya gila-gilaan, di pinggir kota tidak ditunjang dengan fasilitas. Jadi menurut saya, milenial harus segera ambil rumah. Dulu-dulu nyicil, ambil pekerjaan yang bisa di *remoted* dari rumah. Saya tidak setuju dibilang milenial malas dan boros, yang benar rasio pendapatan dan harga rumah terlalu lebar,” katanya.

Pertumbuhan harga rumah saat ini tinggi, tapi pertumbuhan pendapatan tidak secepat harga rumah, pungkasnya.



**KLIPING BERITA DIREKTORAT JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN**

12 / 07 / 2022

|

Sumber: suarasurabaya.net

[https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/
2022/rasio-pendapatan-generasi-muda-tak-
sebanding-dengan-harga-rumah/](https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/rasio-pendapatan-generasi-muda-tak-sebanding-dengan-harga-rumah/)



12 / 07 / 2022

Sumber: idxchannel.com

Intip Cara Mengajukan KPR untuk Pekerja Informal Tanpa Slip Gaji

Author: Aiq Haidar

IDXChannel - Bagaimana Cara Mengajukan KPR untuk Pekerja Informal Tanpa Slip Gaji? Pertanyaan ini sering sekali dilontarkan terutama bagi para pekerja yang tak memiliki slip gaji.

Mengajukan KPR atau kredit kepemilikan rumah menjadi trend bagi anak-anak muda saat ini. Mengapa demikian? Karena di zaman sekarang para Anak muda sudah banyak yang memiliki penghasilan sendiri, terutama para pekerja freelance atau disebut pekerja Informal.

Lantas bagaimana jika mereka ingin mengajukan KPR namun tak punya slip gaji? berikut ini kami berikan informasinya untuk Anda.

Cara Mengajukan KPR untuk Pekerja Informal Tanpa Slip Gaji

Sejak 10 Desember 1976 KPR pertama kali dikembangkan oleh Bank Tabungan Negara (BTN). Kendati demikian hingga kini sudah banyak bank sekelas BUMN, Bank Swasta Nasional Hingga bank Asing juga menerapkan hal yang sama yakni KPR.

Kendati demikian dengan semakin berkembangnya dan semakin banyaknya permintaan masyarakat untuk melakukan KPR membuat Bank BTN akhirnya memfasilitasi KPR subsidi dan

non subsidi untuk debitur dari sektor informal.

Ari Kurniaman selaku Corporate Secretary BTN mengatakan, untuk KPR subsidi, debitur sektor informal dapat menggunakan fasilitas Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).

Sementara untuk KPR non subsidi, pekerja sektor informal dimungkinkan dan diklasifikasikan dalam segmen non fixed income. Untuk dapat diklasifikasikan sebagai segmen tersebut, terdapat sejumlah persyaratan yang perlu dipenuhi debitur. Diharapkan untuk kedepannya informasi digital dapat menjadi pengganti slip gaji bagi pekerja sektor informal yang akan menjadi debitur perseroan.

Demi mempermudah proses pengajuan KPR segmen informal, Ari mendorong pekerja sektor tersebut untuk memiliki perencanaan keuangan sederhana dan menabung di lembaga keuangan yang memiliki catatan digital baik. Sehingga, bank mampu melakukan penghitungan keuangan calon debitur.

Demikianlah cara mengajukan KPR untuk pekerja informal tanpa slip gaji. Semoga bermanfaat.



**KLIPING BERITA DIREKTORAT JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN**

12 / 07 / 2022

| Sumber: idxchannel.com

<https://www.idxchannel.com/milenomic/in-tip-cara-mengajukan-kpr-untuk-pekerja-informal-tanpa-slip-gaji/all>